

- Pembetulan surat izin praktik dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
- Pencabutan surat izin praktik dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
- Standar label pengawasan hygiene sanitasi pangan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

- Izin pergelaran jaringan fiber optik
- Rekomendasi titik lokasi menara telekomunikasi
- Rekomendasi lokasi pergelaran jaringan fiber optik

Perangkat Daerah

- Izin praktek kerja lapangan

Kemantren

- Persetujuan pondokan atau izin pondokan
- Persetujuan pedagang kaki lima atau izin pedagang kaki lima

Dinas Pariwisata

- Rekomendasi dan pengesahan laporan kegiatan usaha bagi biro perjalanan wisata dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh

Dapat diakses di alamat website perizinan

<https://perizinanonline.jogjakota.go.id> atau <https://jss.jogjakota.go.id>

Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan yang Didelegasikan

MEKANISME PERIZINAN & NON PERIZINAN

yang tidak didelegasikan

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang tidak didelegasikan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan

1 PEMOHON
Mengajukan permohonan melalui web perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id

2 OPD TEKNIS
Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
Melakukan penyusunan dan pengesahan rekomendasi/ Izin/ Perizinan
Mengirimkan Izin/ Perizinan dan/atau Non Perizinan yang telah disahkan kepada Pemohon melalui sistem

3 PEMOHON
Rekomendasi/ Izin/ Perizinan terbit secara sistem dan pemohon dapat mencetak secara mandiri melalui perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id

● = PEMOHON ● = OPD TEKNIS

Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan yang Tidak Didelegasikan

MEKANISME PERIZINAN & NON PERIZINAN

yang didelegasikan

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan

1 PEMOHON
Mengajukan permohonan melalui web perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id

2 Pengolah Data dan Informasi PTSP I
Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dokumen permohonan
Apabila terdapat kekurangan kesalahan persyaratan dokumen permohonan maka verifikasi akan mengembalikan dokumen ke pemohon melalui sistem. Apabila ia persyaratan sudah lengkap, maka dokumen permohonan akan dikirimkan kepada OPD Teknis

3 OPD TEKNIS
Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
Menyusun dan Mengirimkan Rekomendasi Teknis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui sistem.
Rekomendasi Teknis sebagai dasar penerbitan perizinan dan/atau Non Perizinan yang didelegasikan.

4 Penelaah Teknis Kebijakan PTSP I
Menyusun draf konsep Surat Keputusan izin dan/atau Non Izin berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah dikirimkan oleh OPD Teknis.

5 Penelaah Teknis Kebijakan PTSP I
Menyusun draf konsep Surat Keputusan izin dan/atau Non Izin berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah dikirimkan oleh OPD Teknis.

6 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memberikan persetujuan draf konsep Surat Keputusan izin dan/atau Non izin
Melakukan pengesahan draf konsep Surat Keputusan izin dan/atau Non izin melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE)

7 PEMOHON
Izin terbit secara sistem dan pemohon dapat mencetak secara mandiri melalui perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id

● = PEMOHON ● = DPMPTSP ● = OPD TEKNIS

Dapat diakses di alamat website <https://simbg.pu.go.id/>

Mekanisme Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung

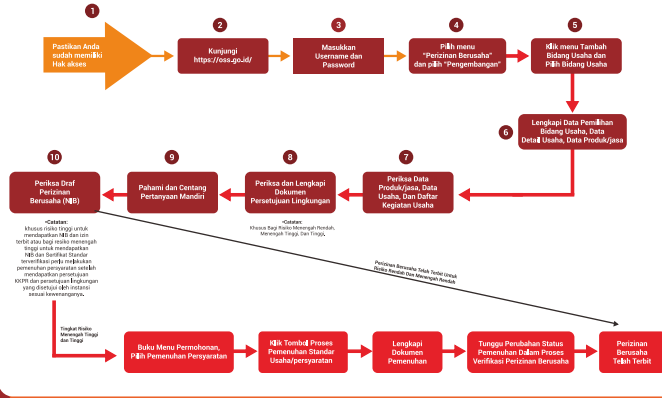


Dasar Hukum:
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dapat diakses di alamat website <https://oss.go.id/>

Mekanisme Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). OSS Berbasis Resiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas (KPBPB).



SEKTOR PERIZINAN



(0274) 514448, 515865, 515866
0813 2670 3476
dpmptsp@jogjakota.go.id
dpmptsp.jogjakota.go.id

<https://perizinanonline.jogjakota.go.id/>

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Uji kelayakan proteksi kebakaran
2. Persetujuan instalasi proteksi kebakaran
3. Manajemen keselamatan kebakaran gedung

Dinas Kebudayaan

1. Pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah kawasan Malioboro 2
2. Rekomendasi bentuk arsitektur

Dinas Perhubungan

1. Izin juru parkir
2. Dispensasi jalan
3. Operasional kendaraan tidak bermotor
4. Persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir swasta
5. Persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah
6. Izin insidental
7. Persetujuan peremajaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum
8. Persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas
9. Rekomendasi penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum
10. Surat keterangan perubahan fungsi dari kendaraan bermotor angkutan umum menjadi kendaraan bermotor perseorangan
11. Surat keterangan muatan barang

Dinas Lingkungan Hidup

1. Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL-UPL
2. Keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib AMDAL
3. Persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
4. Persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
5. Izin penebangan pohon dan pemindahan taman
6. Persetujuan armada angkutan sampah
7. Persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga /sampah domestik
8. Permohonan arahan dokumen lingkungan (penapisan)
9. SPPL
10. Rincian teknis penyimpanan limbah B3
11. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah
12. Persetujuan teknis pembuangan emisi



13. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
14. Surat kelayakan operasional sistem pengolahan air limbah atau fasilitas injeksi
15. Surat kelayakan operasional alat pengendali emisi
16. Surat kelayakan operasional pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bangunan gedung
2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang reklame
3. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang infrastruktur pasif telekomunikasi
4. Izin perubahan penggunaan tanah
5. Rekomendasi pemanfaatan tanah negara
6. Izin penyelenggaraan reklame dengan ukuran = 8m2
7. Izin penyelenggaraan reklame dengan ukuran =8m2
8. Izin penyelenggaraan reklame lukisan dinding
9. Izin penyelenggaraan reklame berjalan
10. Izin penyelenggaraan reklame incidental
11. Informasi kesesuaian tata ruang
12. Rekomendasi kesesuaian tata ruang untuk kekancingan
13. Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

1. Persetujuan operasional lembaga pelatihan kerja pemerintah
2. Izin pengumpulan uang atau barang
3. Tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Surat keterangan penelitian
2. Izin kuliah kerja nyata

Dinas Pendidikan

1. Izin operasional lembaga pendidikan formal
2. Izin operasional lembaga pendidikan nonformal

Dinas Pertanian dan Pangan

1. Izin jagal
2. Surat izin praktik dokter hewan
3. Surat izin praktik dokter hewan warga negara asing
4. Izin penyimpanan daging
5. Izin penggilingan daging
6. Izin penjualan daging
7. Surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan
8. Surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminasi buatan

9. Surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan
10. Surat izin paramedik veteriner asisten teknik reproduksi
11. Izin dokter hewan praktik mandiri
12. Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis
13. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan
14. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner
15. Rekomendasi nomor kontrol veteriner
16. Surat keterangan kesehatan hewan
17. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan atau bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan
18. Rekomendasi instalasi karantina tumbuhan dan hewan

Dinas Perdagangan

1. Persetujuan penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C
2. Persetujuan operasional toko swalayan
3. Persetujuan kajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
4. Izin juru parkir kawasan pasar
5. Pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah kawasan pasar

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman

1. Izin pembuatan jalan masuk (in gang)
2. Persetujuan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum
3. Persetujuan pemakaman untuk pengelolaan krematorium milik swasta
4. Izin penyimpanan abu jenazah milik swasta
5. Izin penyambungan saluran air hujan
6. Izin saluran air limbah

Dinas Kesehatan

1. Surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis
2. Surat terdaftar penyehat tradisional
3. Izin usaha mikro obat tradisional
4. Pembetulan surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
5. Pencabutan surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
6. Izin klinik pemerintah non badan layanan umum atau badan layanan umum daerah
7. Surat izin praktik dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis

